



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
2022**

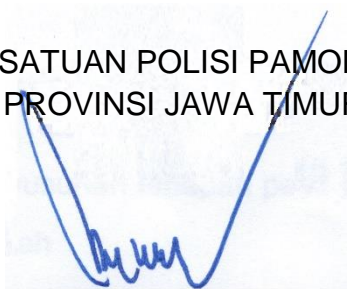
## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan anugrah dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur tahun 2022 telah dapat diselesaikan.

Laporan kinerja disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, wujud transparansi, pertanggungjawaban dan kendali bagi peningkatan kinerja. Laporan kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja selama Tahun 2022 sebagai upaya terselenggaranya pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan responsif.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI JAWA TIMUR



M. HADI WAWAN GUNTORO, S.STP., M.Si. CIPA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19770323 199511 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

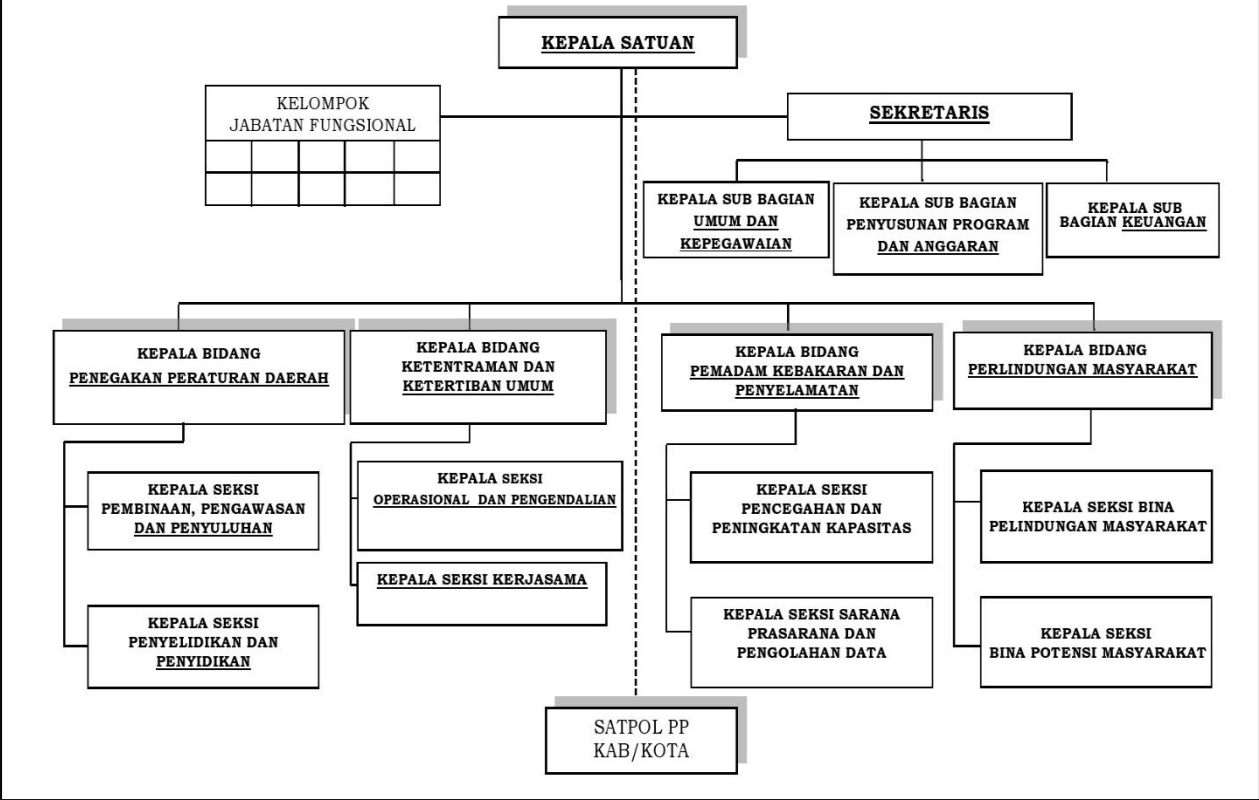
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, diantaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Lebih lanjut, pada Pasal 65 Ayat (1) Huruf b disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Serangkaian dengan kedua Pasal tersebut, Pasal 255 ayat (1) menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan rasa aman, serta merupakan perangkat daerah yang mengampu salah satu dari 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

#### **A. STRUKTUR ORGANISASI**

Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota membawa dampak perubahan terhadap Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yang dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**SATPOL PP PROVINSI JAWA TIMUR**  
(Pergub Jatim. No.43 Th 2021)



Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran.
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri :
  - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
  - a. Seksi Operasional dan Pengendalian.
  - b. Seksi Kerjasama.
5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
  - a. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas.
  - b. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Data.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Pelindungan Masyarakat.
  - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur memiliki :

### **1. Tugas :**

Membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

### **2. Fungsi :**

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Satuan.
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan;
- c. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- e. pengoordinasian pembinaan, pendidikan dan pelatihan pelaksanaan tugas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

## **C. ISU STRATEGIS**

### **1. Permasalahan Utama dan Isu Strategis**

- a. Rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada.
- b. Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan dan sinkronisasi data trantibum.

- c. Belum optimalnya pemberdayaan Satlinmas dalam perlindungan masyarakat.
- d. Belum optimalnya penanganan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur.

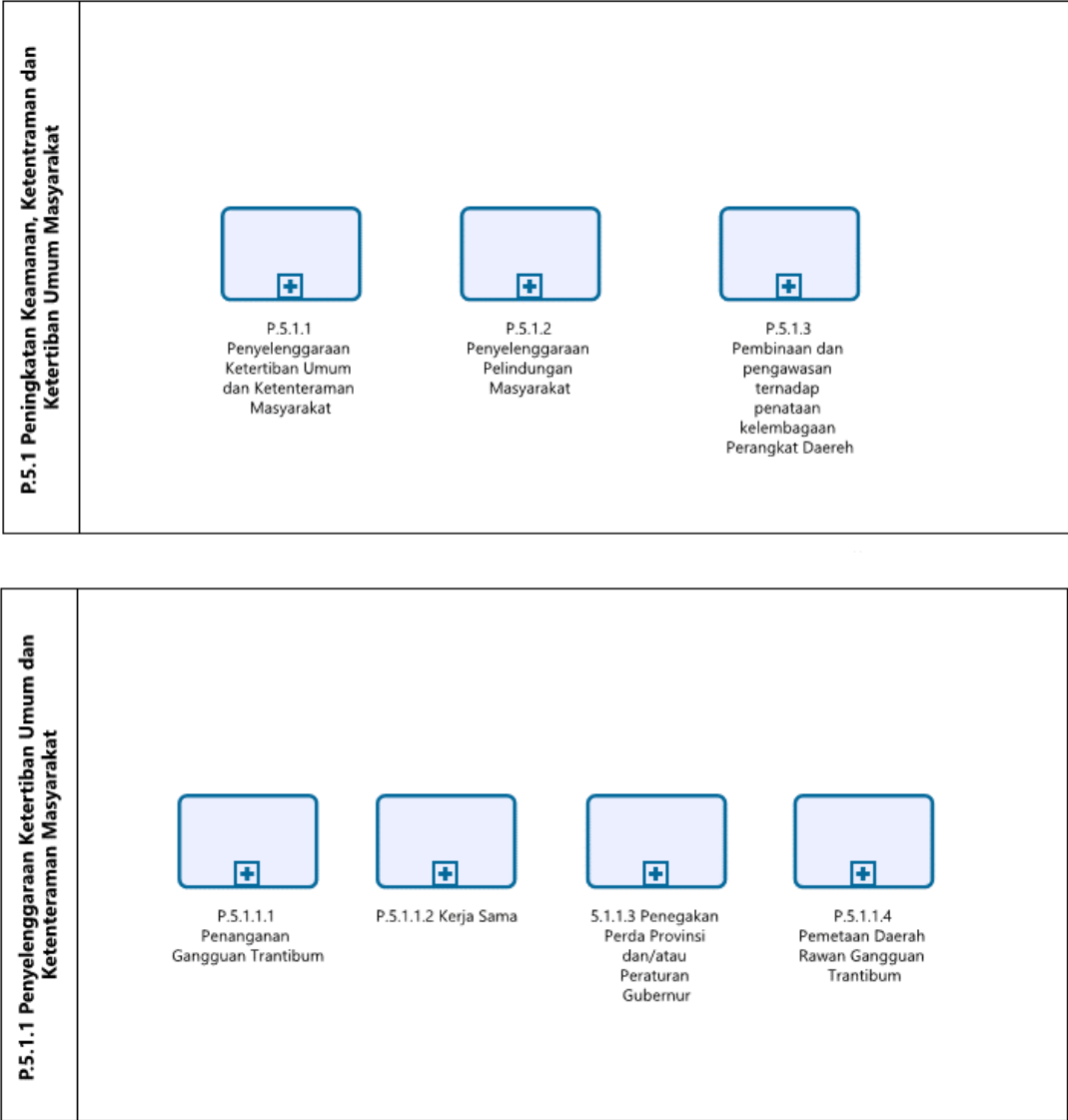
Dari permasalahan pokok tersebut, dirumuskan isu strategis sebagai berikut :





- 1) Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam sosialisasi dan patroli pada kegiatan penegakan Perda/Perkada melalui pembentukan dan pemberdayaan Kader Penegak Perda (Kakanda) serta penguatan PPNS.
  - 2) Mengoptimalkan sinergitas penyelenggaraan trantibumlinmas dan sinkronisasi data melalui penyusunan dan penetapan rencana aksi penyelenggaraan trantibumlinmas dengan Kabupaten/Kota serta pembangunan dan pengembangan media center.
  - 3) Mengoptimalkan pelibatan Satlinmas dalam penyelenggaraan trantibumlinmas di Desa melalui pembentukan dan pemberdayaan Desa SIGAP.
  - 4) Mengoptimalkan penguatan kelembagaan damkar dengan pemenuhan aparatur damkar yang sesuai dengan kualifikasi dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal.
2. Strategi Utama dalam menanggulangi permasalahan dan isu strategis
- a. Sosialisasi dan patroli penegakan Perda/Perkada dengan melibatkan masyarakat serta peningkatan pemberdayaan PPNS.
  - b. Optimalisasi perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan trantibumlinmas.
  - c. Pembangunan dan pengembangan media center untuk sinergitas data penyelenggaraan trantibum linmas.
  - d. Pembentukan dan pembinaan Desa Sigap.
  - e. Penyusunan pemetaan daerah rawan kebakaran.
  - f. Pembinaan dan pengawasan, pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

D. CASCADING KINERJA



E. PETA PROSES BISNIS



P.5.1.2 Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat	<div>  <p>P.5.1.2.1 Pembinaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Linmas)</p> </div> <div>  <p>P.5.1.2.2 Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas)</p> </div>
P.5.1.3 Pembinaan dan pengawasan ternadap penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan	<div>  <p>P.5.1.3.1 Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kebakaran</p> </div> <div>  <p>P.5.1.3.2 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakara</p> </div>

F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Capaian target kinerja dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan melalui 3 Program, 13 Kegiatan, 50 Sub Kegiatan.

1. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi diperoleh dari realisasi pelaksanaan 8 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan capaian indikator program :
  - a. Persentase Indikator Program yang Tercapai
 

Capaian Indikator Program yang Tercapai di tahun 2022 adalah 100%, hasil dari penghitungan terhadap capaian 5 indikator pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.



b. Persentase Realisasi Anggaran

Capaian pada indikator realisasi anggaran tahun 2022 adalah 97,19%. Capaian tersebut didapat dari realisasi anggaran Rp. 181.390.101.434,00 dari pagu Rp. 186.627.878.000,00 pada 3 Program, berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Realisasi anggaran Rp. 35.717.354.163,00 dari pagu Rp. 39.034.662.000,00 dengan capaian 91,50%.
- 2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Realisasi anggaran Rp. 145.286.444.240,00 dari pagu Rp. 147.203.216.000,00 dengan capaian 98,70%.
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.  
Realisasi anggaran Rp. 386.303.031,00 dari pagu Rp. 390.000.000,00 dengan capaian 99,05%.

c. Indeks Profesionalitas ASN

Realisasi nilai indeks profesionalitas ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 adalah 70,8 dari target 64 atau dengan capaian 110,63%. Pencapaian didapat dari peningkatan kompetensi anggota dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti webinar, kelas belajar online maupun bimbingan teknis.

2. Capaian kinerja Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah 117,14% dengan realisasi kinerja 99,57% dari target kinerja yang ditetapkan 85% dalam dokumen perencanaan. Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan :

- a. Penegakan perda dan perkara dengan mengedepankan tindakan preemtif, preventif, edukatif dan humanis melalui :
  - 1) Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada pelanggar perda dan perkara.
  - 2) Pemberdayaan Kader Penegak Perda (KAKANDA) yang terdiri berbagai elemen masyarakat untuk melakukan sosialisasi perda dan perkara.
  - 3) Optimalisasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
  - 4) Sosialisasi peraturan perundangan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

- b. Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas melalui :
  - 1) Deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengawalan, pengamanan, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta penertiban.
  - 2) Implementasi perjanjian kerja sama daerah antara pemerintah provinsi dengan 38 kabupaten/kota.
  - 3) Pembinaan aparatur Linmas dan Satgas Linmas serta pelatihan dan pemberdayaan Satlinmas.
  - 4) Pendampingan pembentukan Posko Linmas dan Desa SIGAP.
- 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terealisasi 100% dari target perencanaan 80% sehingga capaian pada program tersebut 125% dengan kegiatan :
  - a. Fasilitasi inspeksi proteksi dini pencegahan kebakaran untuk bangunan gedung milik perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur.
  - b. Pembinaan dan pelatihan aparatur Damkar dan Relawan Damkar (Redkar).
  - c. Pendampingan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan kebakaran.
  - d. Pendampingan pembentukan Redkar dan Pos Damkar.

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai konsekuensi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**2. 1. Rencana Strategis 2019-2024**

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pada periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2019-2024, dimana terdapat 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang disertai oleh 1 (satu) indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa kebijakan dan program ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis yang kemudian dijabarkan ke dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan rencana capaian kinerja untuk satu tahun tertentu.

Berikut adalah tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dibawah ini :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KINERJA TUJUAN/SASARAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan Lama								
Meningkatkan Pelayanan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap per Undang-Undang an Daerah	Persentase penurunan pelanggaran perda	5%	5%				
	Meningkatnya ketertiban umum masyarakat	Persentase Tindakan Preventif	5%	5%				
	Meningkatkan peran Satlinmas dan masyarakat dalam Pam Swakarsa, deteksi dini daerah rawan bencana dan kebakaran	Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang terlatih	5%	5%				
Tujuan Baru								
Menyelenggarakan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur	Persentase penanganan gangguan Trantibum dan Linmas			80%	85%	90%	95%
Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	Terwujudnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur	Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran				80%	85%	90%

2. 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja memuat indikator kinerja pada tingkat sasaran dan program kegiatan. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja merupakan langkah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja mempresentasikan komitmen pimpinan untuk berkinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, dan meningkatkan akuntabilitas.

Transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pihak penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 merupakan target kinerja dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur 2019-2024 untuk melaksanakan anggaran 3 Program, 13 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- 2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Sasaran	Indikator	Target	Perpektif
1.	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur	Persentase penanganan gangguan Trantibum dan Linmas	85 %	Penerima layanan
2.	Terwujudnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur	Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran	80%	Penerima Layanan

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.034.662.000	APBD
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	147.203.216.000	APBD
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	390.000.000	APBD
	186.627.878.000	

Dalam wujudkan target kinerja Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Satuan Polisi pamong Praja mendapat dukungan anggran APBD sebesar Rp. 186.627.878.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 3 Program, 13 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode simpulan pencapaian kinerja sasaran. Kinerja suatu sasaran atau kegiatan dapat diukur dengan menetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut.

Indikator kinerja output merupakan keluaran yang dapat diketahui secara langsung sebagai bentuk kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja outcome adalah hasil atau manfaat langsung yang dapat dirasakan dari pelaksanaan kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang dapat dirasakan dalam jangka panjang dan berdampak luas atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada output atau outcome dan sebagian berupa indikator benefit. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 merupakan pelaporan kinerja beserta tolok ukur pada Renstra 2019-2024 yang merupakan implementasi Rencana Kerja (Renja) tahun ketiga dari lima tahun yang direncanakan.

Sesuai petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur menetapkan indikator sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur di Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Perbandingan pencapaian target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur	Persentase penanganan gangguan Trantibum dan Linmas	85%	99,57%	117,14%
Terwujudnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur	Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran	80%	100%	125%

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target			Realisasi (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap per Undang-Undangan Daerah	Persentase penegakan Pelanggaran Perda Provinsi Jawa Timur	5%	-		4,97%	-	-
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur	Persentase penanganan gangguan Trantibum dan Linmas	-	80%	85%	-	99,47 %	99,57 %
Terwujudnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur	Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran	-	-	80%	-	-	100%

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024

Pencapaian kinerja sasaran dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dengan target kinerja sesuai Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019-2024 pada Tahun 2022	Target Renja 2022
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100%	100%
	Persentase Realisasi Anggaran	95%	95%
	Indeks Profesionalitas ASN	64	64
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	10
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan	12	12
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12	12
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan Keuangan	12	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	2	2
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Tanggapan Atas LHP	12	12
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan	1	1



Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Prognosis	4	4
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	4	4
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	4
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	3
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	1
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	4
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan penyediaan jasa	4	4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	12
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Genset Repeater	1	1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	80%	80%
	Presentase Penegakan Perda/Perkada	80%	80%
	Persentase Anggota Linmas dalam Pelindungan Masyarakat	80%	80%
	Persentase SDM yang terlatih	80%	80%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	90%	90%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4	4
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang	4	4
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	4	4
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	4
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	4
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2	2
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2	2
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	1

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	1
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	4	4
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4	4
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4	4
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4	4
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	2	2
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1	1
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditepat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	4	4
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	80%	80%
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah pemetaan daerah rawan bencana kebakaran di wilayah provinsi Jawa Timur	80%	80%
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	200	200
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase anggota Balakar dan masyarakat yang sudah terlatih dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	80%	80%
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah anggota Balakar yang sudah terampil dan ahli dalam tugasnya membantu Damkar Kab/Kota	170	170

4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusi alternatif
- a. Keberhasilan
- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam sosialisasi dan patroli pada kegiatan penegakan Perda/Perkada melalui pembentukan dan pemberdayaan Kader Penegak Perda (Kakanda) di Kabupaten/Kota.

- 2) Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan trantibumlinmas dan sinkronisasi data melalui penyusunan dan penetapan rencana aksi penyelenggaraan trantibumlinmas melalui perjanjian kerja sama dengan Kabupaten/Kota serta pembangunan Sistem Integrasi Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur (Sijalinmaja) sebagai embrio pemetaan daerah rawan gangguan trantibumlinmas dan damkar.
  - 3) Meningkatnya peran Satuan Tugas (Satgas) Linmas dalam upaya membantu membina, melatih dan memberdayakan Satlinmas pada penyelenggaraan trantibumlinmas di Desa dan inisiasi pembentukan dan pemberdayaan Desa SIGAP, yaitu desa yang terintegrasi membantu penyelenggaraan trantibumlinmas.
  - 4) Meningkatnya penguatan kelembagaan damkar dengan pemenuhan aparatur damkar yang sesuai dengan kualifikasi melalui keikutsertaan Diklat dan pemenuhan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal secara bertahap.
- b. Permasalahan
- 1) Belum adanya perencanaan berjangka penegakan perda/perkada berbasis data kasus.
  - 2) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan sinkronisasi data dan penyelenggaraan trantibumlinmas.
  - 3) Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan Satgas Linmas serta pelatihan dan pemberdayaan Satlinmas.
  - 4) Sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran tidak menjadi sebagai satu bidang urusan pada Kementerian Dalam Negeri, sehingga koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergiitas (KISS) menjadi kendala dalam melakukan pengauatan kelembagaan.
- c. Solusi
- 1) Menyusun dan menetapkan rencana aksi penegakan perda/perkada.
  - 2) Mengembangkan Sijalinmaja sebagai media pelaporan penyelenggaraan trantibumlinmas kabupaten/kota untuk mewujudkan Satu Data Jawa Timur, dan sebagai pengembangan SPBE pada Satpol PP Provinsi Jawa Timur.

- 3) Menyusun target kinerja pembentukan Satgas Linmas dan menerapkan IKI untuk pengelolaan Satlinmas di Jawa Timur.
  - 4) Menginisiasi pembentukan Dinas Damkar Provinsi dan melakukan fasilitasi bagi kabupaten/kota.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya didapat dari pengukuran persentase capaian kinerja dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran di tahun yang sama.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Efisiensi
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur	Persentase penanganan gangguan Trantibum dan Linmas	117,14%	98,70%	18,44%
Terwujudnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur	Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran	125%	99,05%	25,95%

- Efisiensi penggunaan anggaran dapat dijelaskan bahwa perencanaan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis, sebagian tidak mengalokasikan anggaran operasional, khususnya kegiatan yang dilakukan di dalam kota, dan optimalisasi penggunaan zoom meeting untuk kegiatan rapat, koordinasi, dan sosialisasi.
6. Analisis terhadap program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur di Tahun 2022 terdapat program dan kegiatan dengan capaian indikator kinerja yang melampaui target diantaranya :
- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Pencapaian kinerja terhadap target pada program Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 117,14% melalui 4 indikator program :
- 1) Presentase penegakan perda/perkada, dengan capaian 125%, didapat dari kegiatan penegakan terhadap 7 Perda yang menjadi prioritas ditegakkan.

- 2) Persentase penanganan gangguan trantibum, dengan capaian kinerja 114,73%. Pencapaian didapat dari tingginya realisasi kegiatan pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, berupa kegiatan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah serta penanganan unjuk rasa.
  - 3) Persentase anggota Linmas dalam perlindungan masyarakat, dengan capaian kinerja 132,52% didapat dari realisasi penyelenggaraan Linmas pada kegiatan membantu tibum dan tranmas, membantu bencana dan kebakaran, membantu penyelenggaraan pemilihan umum, dan membantu kegiatan lainnya.
  - 4) Persentase SDM yang terlatih, dengan capaian kinerja 125,60% didapat dari pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas serta sosialisasi dan bimbingan teknis dengan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- Pencapaian kinerja terhadap target pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran didapat dari pencapaian indikator Persentase Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan capaian 125% melalui kegiatan :
- 1) Pembinaan Aparatur Damkar dan Redkar.
  - 2) Pendampingan pembentukan Redkar di Desa/Kelurahan.
  - 3) Pendampingan Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran.
  - 4) Pendampingan Pembentukan Pos Damkar di Kecamatan.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), beberapa kegiatan diarahkan pada pembinaan preventif dengan mengedepankan pemahaman terhadap regulasi-regulasi yang menjadi dasar dan pengambilan keputusan. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pengelolaan data perencanaan, pembinaan laporan keuangan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, pembinaan kepegawaian, penyempurnaan

SOP, penyusunan penetapan kinerja, pembinaan SDM, pengelolaan data informasi, penertiban pemanfaatan aset, dan penggunaan SPBE, namun dalam pelaksanaannya tidak semuanya dapat berjalan dengan baik karena terdapat beberapa kendala.

Analisis lingkungan internal :

a. Kekuatan :

- 1) Jumlah Sumber Daya Manusia.
- 2) Dukungan finansial/anggaran melalui APBD.
- 3) Adanya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas
- 4) Dukungan sarana dan prasarana

b. Kelemahan :

- 1) Belum adanya sinergitas dalam melaksanakan program kegiatan antar unit kerja
- 2) Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kompetensi di bidang trantibum dan penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya
- 3) Kurangnya pemahaman anggota Pol PP dan PPNS terhadap tugas dan fungsi dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sistem informasi yang belum berjalan dengan optimal.

c. Peluang :

- 1) Komitmen dan kemauan dari pimpinan untuk memperbaiki kinerja
- 2) Adanya kemitraan antara Pemerintah, TNI, POLRI, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat.
- 3) Terjalinnya kerjasama yang sinergi di bidang keamanan dan ketertiban dengan semua pihak untuk menciptakan masyarakat.
- 4) Semakin meningkatnya proses pemberdayaan seluruh perangkat aparatur dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya yang tersedia
- 5) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

d. Ancaman :

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat, aparatur, dan badan hukum terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Kurang akuratnya data dan informasi tentang gangguan trantibumlinmas dan keterbatasan sarana pendukungnya.

- 3) Adanya perubahan politik dan kebijaksanaan nasional yang berdampak pada peran Satpol PP dimasa depan tidak hanya dalam penyelenggaraan trantibumlinmas, namun peranan tersebut meluas pada bidang lain dan menyentuh kepentingan masyarakat banyak.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan.

Pada Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 186.627.878.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 181.390.101.434,17 atau 97,19% dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>186.627.878.000,00</b>	<b>181.390.101.434,17</b>	<b>97,19</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>39.034.662.000,00</b>	<b>35.717.354.163,00</b>	<b>91,50</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>223.482.000,00</b>	<b>208.959.909,00</b>	<b>93,50</b>
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	15.000.000,00	14.499.830,00	96,67
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	8.500.000,00	8.450.000,00	99,41
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	8.500.000,00	7.620.000,00	89,65
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	4.740.000,00	3.810.000,00	80,38
<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	4.740.000,00	2.010.000,00	42,41
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	63.520.000,00	54.718.461,00	86,14
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	118.482.000,00	117.851.618,00	99,47
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>30.742.800.000,00</b>	<b>27.615.745.415,00</b>	<b>89,83</b>
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	30.272.580.000,00	27.191.805.965,00	89,82
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	440.220.000,00	396.975.750,00	90,18
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	5.000.000,00	4.804.400,00	96,09
<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	5.000.000,00	4.840.000,00	96,80
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	5.000.000,00	3.483.000,00	69,66
<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	5.000.000,00	4.648.000,00	92,96
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	5.000.000,00	4.760.700,00	95,21



<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	5.000.000,00	4.427.600,00	88,55
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>110.073.423,00</b>	<b>108.952.250,00</b>	<b>98,98</b>
<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	110.073.423,00	108.952.250,00	98,98
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.396.976.727,00</b>	<b>1.369.364.019,00</b>	<b>98,02</b>
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	13.240.650,00	12.570.750,00	94,94
<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	1.366.736.077,00	1.340.985.269,00	98,12
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	9.000.000,00	8.908.000,00	98,98
<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	8.000.000,00	6.900.000,00	86,25
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>202.459.571,00</b>	<b>197.960.271,00</b>	<b>97,78</b>
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	94.600.000,00	93.518.971,00	98,86
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	12.000.000,00	11.808.000,00	98,40
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	5.249.571,00	5.035.000,00	95,91
<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	10.660.000,00	8.398.300,00	78,78
<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	79.950.000,00	79.200.000,00	99,06
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>197.736.904,00</b>	<b>195.965.249,00</b>	<b>99,10</b>
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	197.736.904,00	195.965.249,00	99,10
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.129.176.168,00</b>	<b>5.035.813.530,00</b>	<b>98,18</b>
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.000.000,00	3.996.300,00	99,91
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	366.000.000,00	316.847.701,00	86,57
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	42.085.000,00	35.626.000,00	84,65
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	4.717.091.168,00	4.679.343.529,00	99,20
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.031.957.207,00</b>	<b>984.593.520,00</b>	<b>95,41</b>
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	113.625.000,00	90.118.100,00	79,31
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	170.428.101,00	153.847.050,00	90,27
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	276.204.106,00	275.992.979,00	99,92
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	471.700.000,00	464.635.391,00	98,50
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>147.203.216.000,00</b>	<b>145.286.444.240,17</b>	<b>98,70</b>
<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>140.805.816.000,00</b>	<b>140.575.742.756,17</b>	<b>99,84</b>
<i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>	668.080.000,00	666.861.500,00	99,82

<i>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</i>	59.540.000,00	59.454.500,00	99,86
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi</i>	533.923.000,00	492.905.130,00	92,32
<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	540.000.000,00	502.073.392,00	92,98
<i>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia</i>	6.865.000,00	6.250.000,00	91,04
<i>Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>	86.666.389,00	81.645.936,00	94,21
<i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	138.845.186.611,00	138.752.114.298,17	99,93
<i>Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</i>	15.555.000,00	14.438.000,00	92,82
<i>Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada</i>	50.000.000,00	0,00	0,00
<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>6.343.470.000,00</b>	<b>4.672.710.344,00</b>	<b>73,66</b>
<i>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>	2.150.335.000,00	1.787.979.528,00	83,15
<i>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>	50.750.000,00	43.108.600,00	84,94
<i>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>	4.142.385.000,00	2.841.622.216,00	68,60
<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>53.930.000,00</b>	<b>37.991.140,00</b>	<b>70,45</b>
<i>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</i>	30.000.000,00	27.009.840,00	90,03
<i>Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS</i>	23.930.000,00	10.981.300,00	45,89
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>386.303.031,00</b>	<b>99,05</b>
<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>195.992.550,00</b>	<b>98,99</b>
<i>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	198.000.000,00	195.992.550,00	98,99
<b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>192.000.000,00</b>	<b>190.310.481,00</b>	<b>99,12</b>
<i>Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	192.000.000,00	190.310.481,00	99,12
	<b>186.627.878.000,00</b>	<b>181.390.101.434,17</b>	<b>97,19</b>

### **C. TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI**

Peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dalam menegakkan perda/perkada dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur pada tahun berikutnya, akan dilakukan langkah-langkah strategis sebagaimana telah dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusi alternatif pada uraian sebelumnya, dan diperkuat dengan IKI:

1. Inisiatif melakukan perubahan dan perbaikan pada 8 (delapan) area perubahan untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
2. Kolaborasi dengan TNI/Polri, elemen strategis lainnya dan pentahelix (pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media).
3. Inovasi pelayanan untuk memberikan layanan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan kinerja yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur didukung dengan ringkasan capaian kinerja. Pelaporan ini dapat digunakan sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam menyusun langkah-langkah perbaikan selanjutnya.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur adalah ukuran penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, yaitu menyelenggarakan pembinaan ketenteraman, ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat serta melaksanakan urusan pemerintah bidang pemadam kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang dimiliki serta perkembangan kompleksitas permasalahan masyarakat berupaya untuk memberikan pelayanan paripurna, mewujudkan situasi yang aman, tertib, tentram dan kondusif dengan meningkatkan profesionalisme dan performance anggotanya.

A. PERJANJIAN KINERJA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :


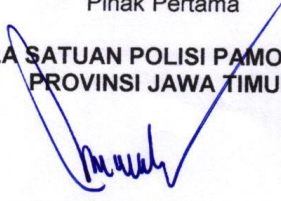
Nama : M. HADI WAWAN GUNTORO, S.STP., M.Si., CIPA  
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA  
Jabatan : GUBERNUR JAWA TIMUR  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 31 Oktober 2022

<p>Pihak Kedua</p>  <p><b>KHOFIFAH INDAR PARAWANSA</b></p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p><b>KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR</b></p> <p><b>M. HADI WAWAN GUNTORO, S.STP., M.Si., CIPA</b> Pembina Utama Muda NIP. 19770323 199511 1 001</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perpektif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur	Persentase penanganan gangguan Trantibum dan Linmas	85 %	Penerima layanan
2.	Terwujudnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur	Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran	80%	Penerima Layanan

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 39.034.662.000,-	PAPBD
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 147.203.216.000,-	PAPBD
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 390.000.000,-	PAPBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 186.627.878.000,-</b>	

Surabaya, 31 Oktober 2022


Pihak Kedua,



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI JAWA TIMUR



M. HADI WAWAN GUNTORO, S.STP., M.Si., CIPA

Pembina Utama Muda

NIP. 19770323 199511 1 001

B. Form Pendanaan Indikatif pada Renstra Perubahan 2019-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TH 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang Tercapai	%	100	100	35.691.152.000	100	41.044.824.800	100	42.115.559.360	100	42.829.382.400	100
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	163.950.000	7	188.542.500	7	193.461.000	7	196.740.000	35
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	50
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	63.950.000	4	50.000.000	4	60.000.000	4	65.000.000	20
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	45.000.000	4	118.482.000	4	125.000.000	4	130.000.000	20
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	12	28.765.398.000	12	33.080.207.700	12	33.943.169.640	12	34.518.477.600	60

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	12	27.091.984.000	12	31.302.626.000	12	32.876.377.709	12	33.862.669.040	60
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	419.040.000	12	457.104.000	12	480.000.000	12	500.000.000	60
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	11.550.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	60
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	15.000.000	12	5.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	60
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	10.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	10
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	10.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	60
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	4	4	209.000.000	4	240.350.000	4	246.620.000	4	250.800.000	20
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			-		-		1.000.000		1.000.000	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			-		-		2.500.000		2.575.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			-		-		2.500.000		2.575.000	



Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Laporan	4	4	209.000.000	4	240.350.000	4	115.000.000	4	120.000.000	20
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	5.220.054.000	4	6.003.062.100	4	6.159.663.720	4	6.264.064.800	20
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	12	12	-	12	-	12	5.000.000	12	5.000.000	60
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	3	3	422.198.000	3	10.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	15
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen					-		5.000.000		5.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen			-		-		100.000.000		100.000.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	4.777.211.000	12	1.082.700.298	12	1.100.000.000	12	1.139.925.000	60
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	9.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	12.500.000	5
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	8.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	5
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	-	1	-	1	25.000.000	1	25.000.000	5
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	4	4	144.250.000	4	165.887.500	4	170.215.000	4	173.100.000	20
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket			-		-		5.000.000		5.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			-		-		5.000.000		5.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			14.000.000		-		-		-	

## LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	140.460.000	1	94.600.000	1	100.000.000	1	125.000.000	5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	9.160.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	5
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	4.840.000	1	3.500.000	1	5.000.000	1	7.500.000	5
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1		-		-		25.000.000		25.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	500.000	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	5
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			-		79.950.000		100.000.000		150.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan			441.518.000		-		112.000.000		153.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit			-		-		1.000.000		1.500.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit			-		-		1.000.000		1.500.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket			106.108.000		-		110.000.000		150.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit			335.410.000		-		-		-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan penyediaan jasa	laporan	4	4	734.782.000	4	5.057.332.938	4	5.295.000.000	4	5.420.000.000	20
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	2.500.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	366.000.000	12	366.000.000	12	380.000.000	12	400.000.000	60

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	9.500.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	5
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	356.782.000	1	4.682.332.938	1	4.900.000.000	1	5.000.000.000	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa	paket		5	768.729.000	5	977.432.207	5	1.065.000.000	5	1.115.000.000	20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit		4	82.500.000	4	82.500.000	4	85.000.000	4	90.000.000	16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		12	188.399.000	12	170.428.101	12	180.000.000	12	185.000.000	48
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		1	265.000.000	1	287.904.106	1	300.000.000	1	325.000.000	4
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			232.830.000		436.600.000		500.000.000		515.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	75%	80%	3.585.566.000	80%	4.123.400.900	80%	4.230.967.880	80%	4.302.679.200	80%
	Presentase Penegakan Perda/Perkada	%		80%		80%		80%		80%		80%
	Persentase Anggota Linmas dalam Pelindungan Masyarakat	%		80%		80%		80%		80%		80%
	Persentase SDM yang terlatih	%		80%		80%		80%		80%		80%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	%	75%	80,00%	2.685.566.000	85,00%	3.088.400.900	90,00%	3.168.967.880	95,00%	3.222.679.200	95%

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	0	250	600.000.000	250	690.000.000	250	708.000.000	250	720.000.000	1000
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	Kasus	0	20	100.000.000	20	115.000.000	20	118.000.000	20	120.000.000	80
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	4	4	550.000.000	4	632.500.000	4	649.000.000	4	660.000.000	20
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	4	4	640.566.000	4	736.650.900	4	755.867.880	4	768.679.200	20
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	400	545.000.000	400	626.750.000	400	643.100.000	400	654.000.000	1600
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	2	2	100.000.000	2	115.000.000	2	118.000.000	2	120.000.000	10
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	0	10	50.000.000	10	57.500.000	10	59.000.000	10	60.000.000	40
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	50.000.000	1	57.500.000	1	59.000.000	1	60.000.000	5

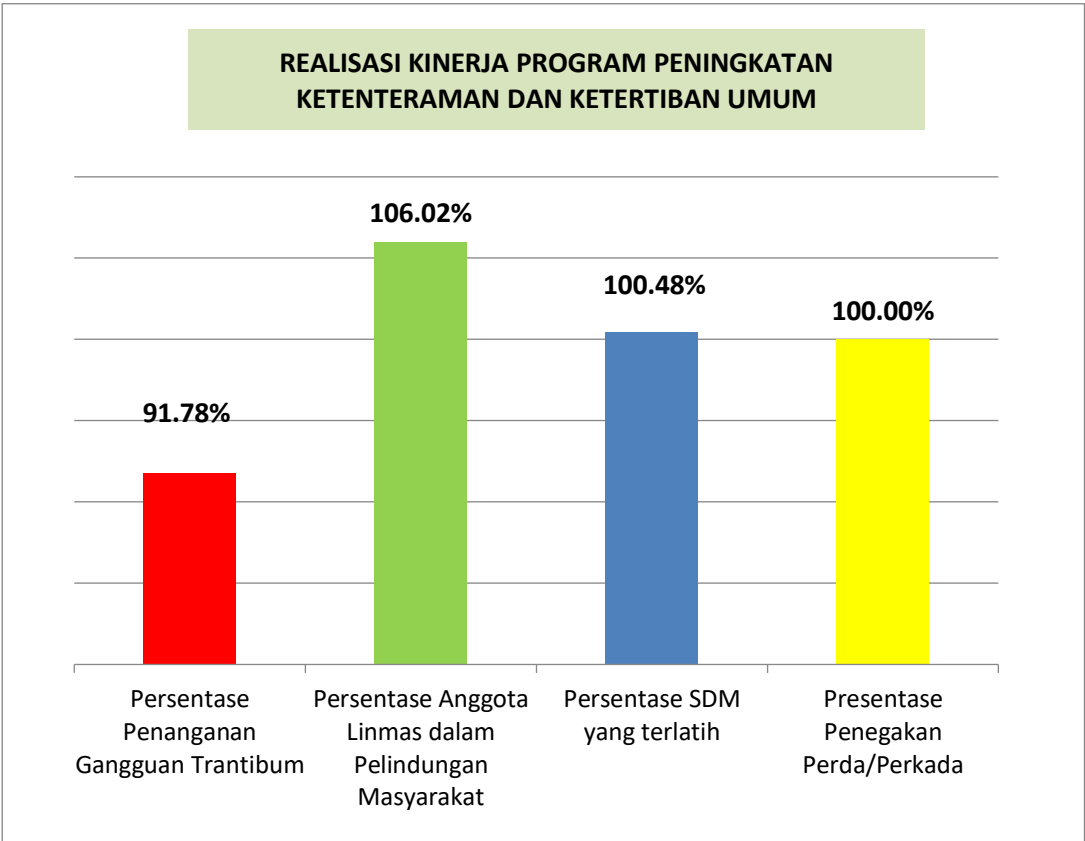
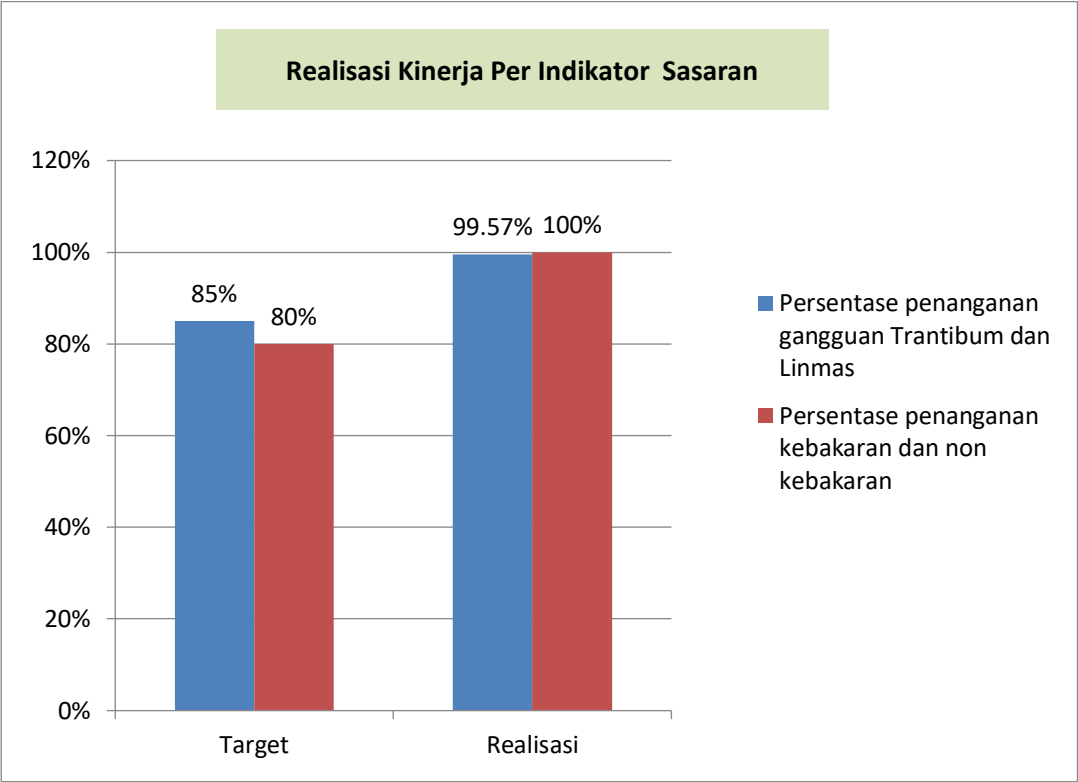
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1	1	50.000.000	1	57.500.000	1	59.000.000	1	60.000.000	5
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Kegiatan	4	4	750.000.000	4	862.500.000	4	885.000.000	4	900.000.000	20
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	4	4	300.000.000	4	345.000.000	4	354.000.000	4	360.000.000	20
Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	4	4	100.000.000	4	115.000.000	4	118.000.000	4	120.000.000	20
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	4	4	350.000.000	4	402.500.000	4	413.000.000	4	420.000.000	20
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Kegiatan	2	2	150.000.000	2	172.500.000	2	177.000.000	2	180.000.000	10
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	1	1	75.000.000	1	86.250.000	1	88.500.000	1	90.000.000	5
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Laporan	4	4	75.000.000	4	86.250.000	4	88.500.000	4	90.000.000	20
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	75%	0%	-	80%	400.000.000	85%	420.000.000	90%	441.000.000	90%
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakakaran	Jumlah pemetaan daerah rawan bencana kebakaran di wilayah provinsi Jawa Timur	%	75%	0%	-	80%	200.000.000	85%	200.000.000	90%	200.000.000	90%

Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	0	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2
Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	0	0	-	0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	2
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	-	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	9
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	0	0	-	0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	2
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen	0	0	-	0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	2
Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	-	0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	100
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	0	0	-	0	-	2	100.000.000	2	100.000.000	4

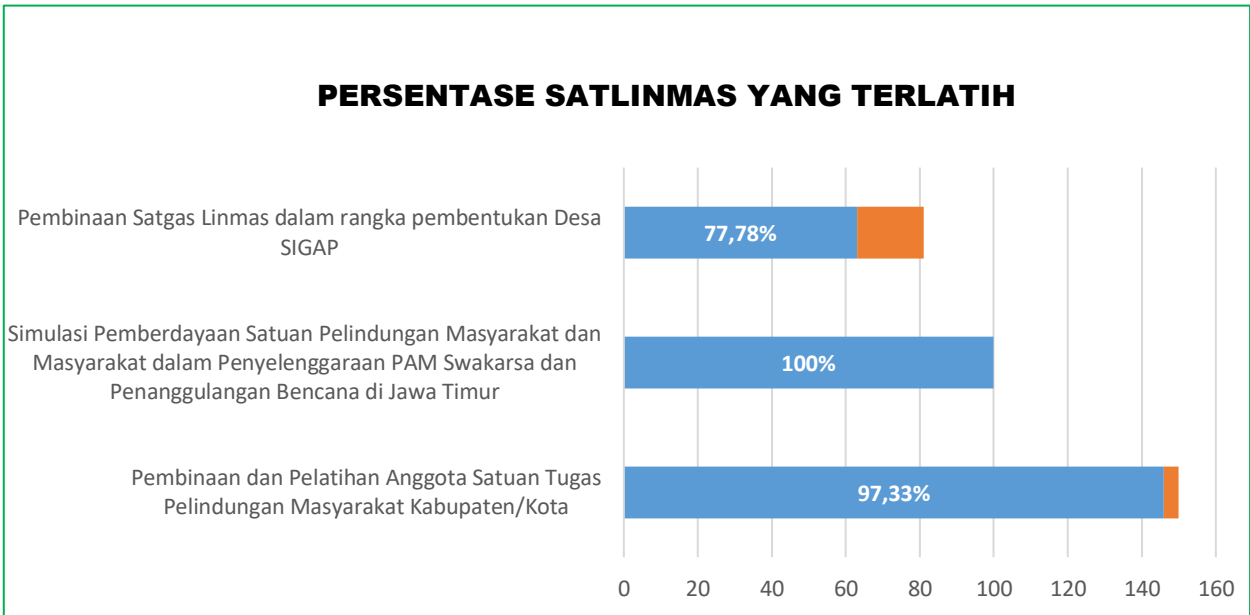
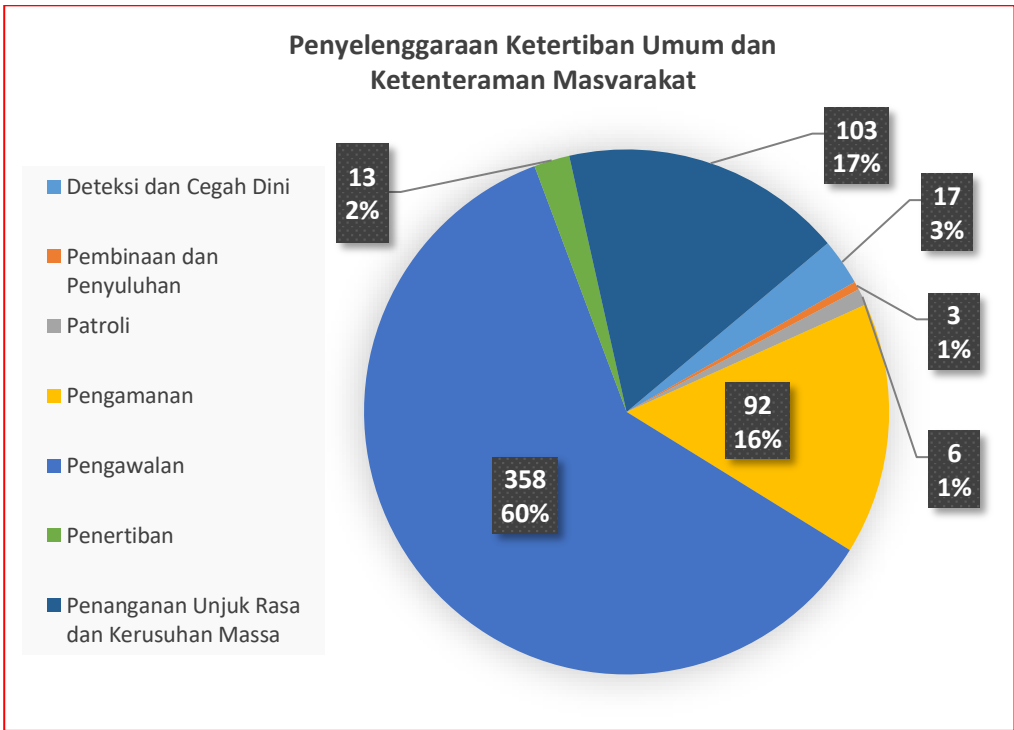
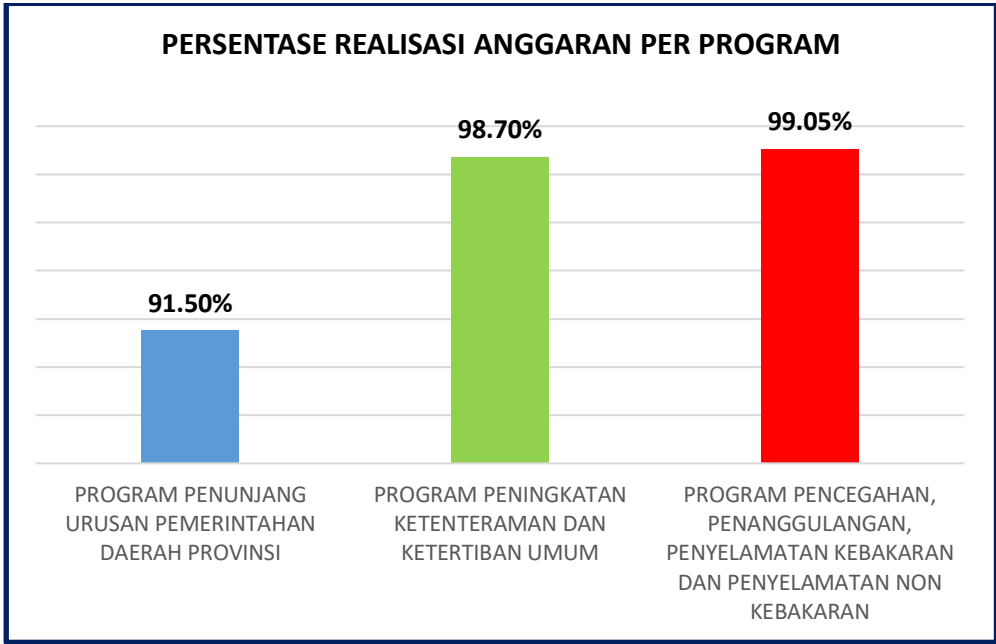
LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

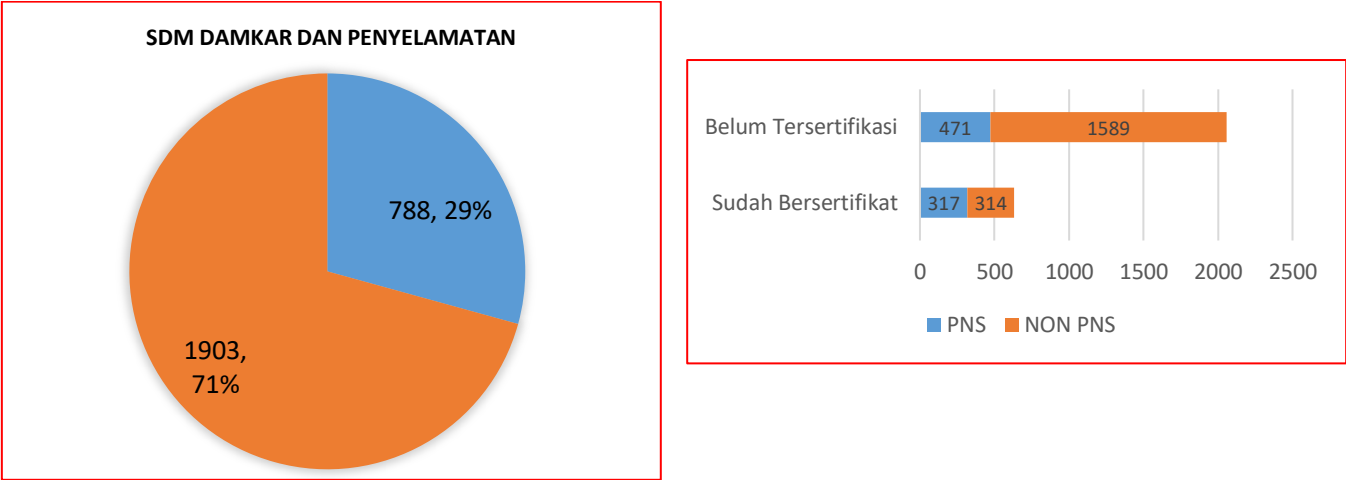
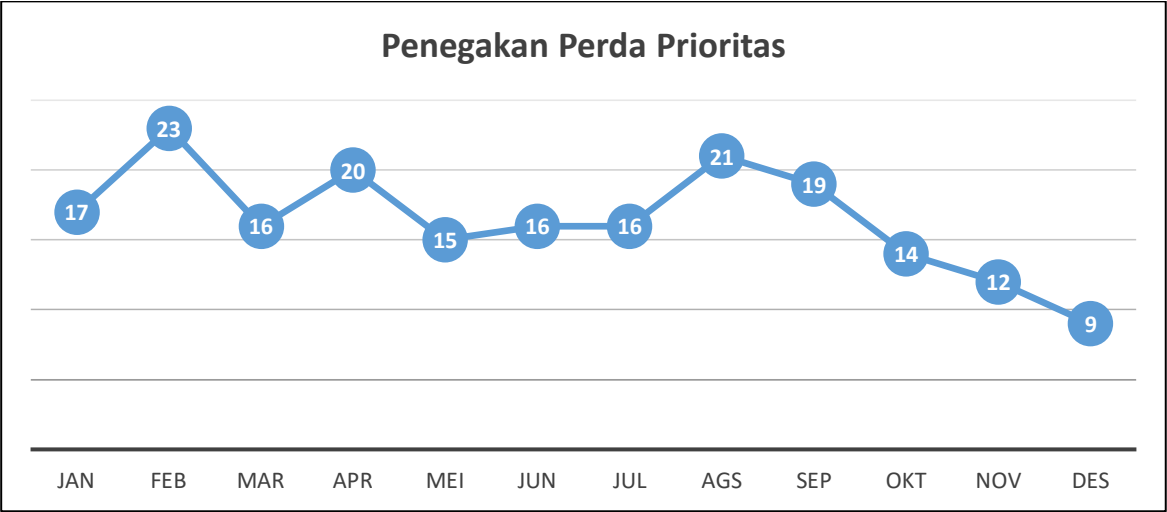
Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Dokumen	0	0	-	0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	2
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah anggota Balakar dan masyarakat yang sudah terlatih dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	75%	0%	-	80%	200.000.000	85%	159.935.633	90%	167.932.414	90%
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	0	0	-	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	9
Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	0	0	-	0	-	2	100.000.000	2	100.000.000	4

C. Rekapitulasi Data





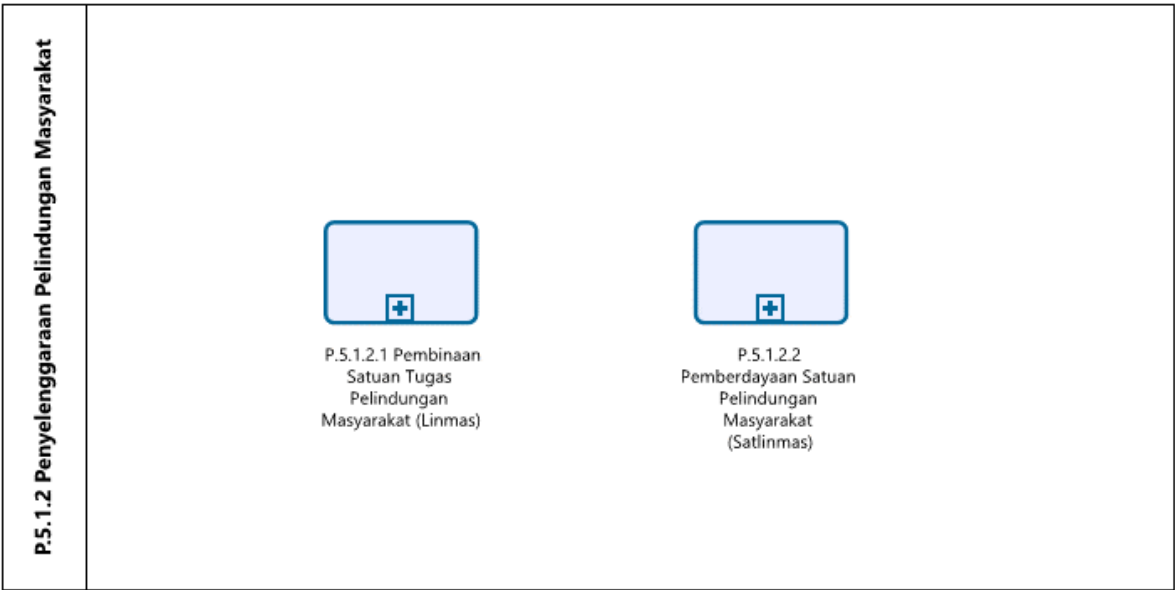
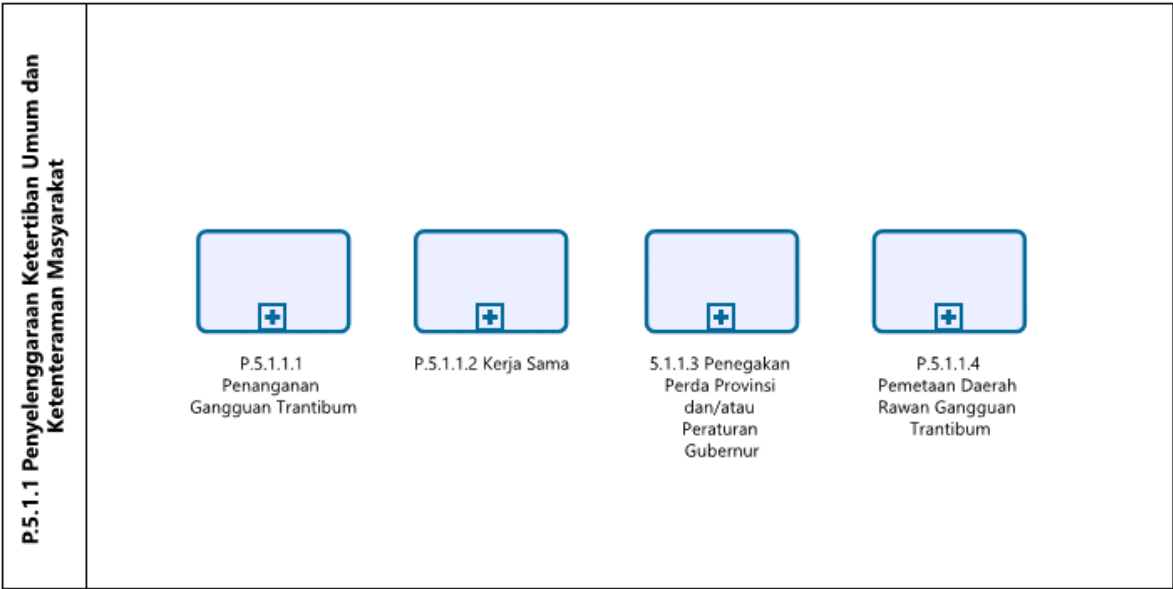
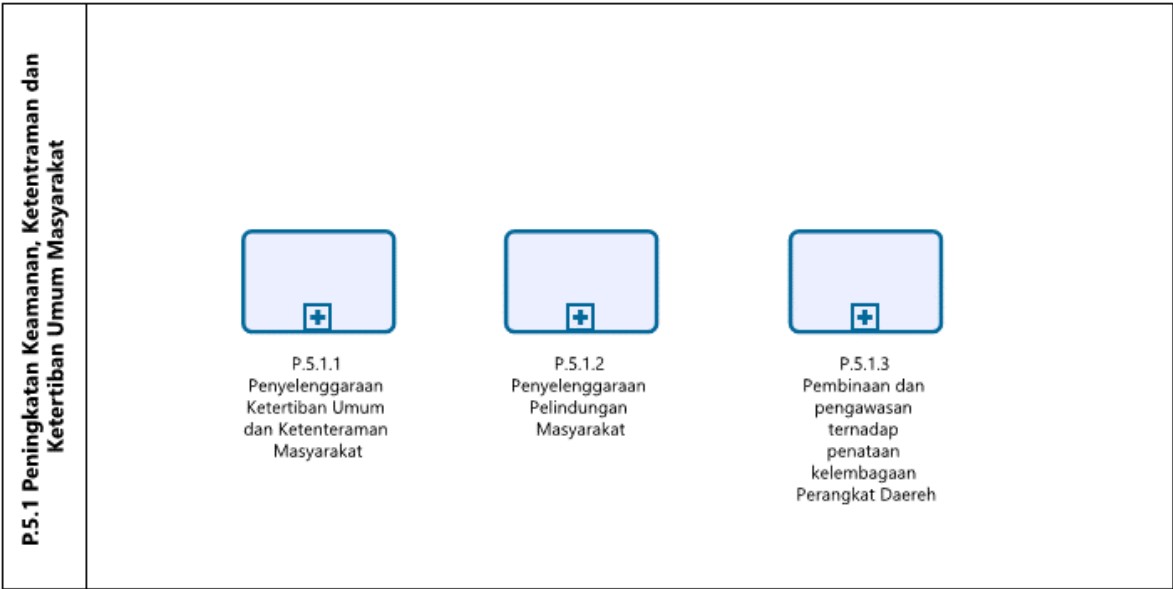




D. Cascading Kinerja



E. Peta Proses Bisnis



<p>P.5.1.3 Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan</p>	<div data-bbox="594 333 748 438"></div> <div data-bbox="597 458 740 543"> <p>P.5.1.3.1 Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kebakaran</p> </div> <div data-bbox="979 333 1133 438"></div> <div data-bbox="976 458 1133 630"> <p>P.5.1.3.2 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakara</p> </div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------